

DERAP NUSANTARA

RABU WAGE, 17 APRIL 2024 (7 SAWAL 1957)

HALAMAN 12

Bapanas: Subsidi Bunga Pinjaman Perkuat Cadangan Pangan Pemerintah

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menuturkan subsidi bunga pinjaman untuk Perum Bulog dan ID FOOD menjamin penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pada 2024.



ANTARA/Sumarwoto

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memberikan keterangan pers.

"Tahun 2024 ini adalah tahun optimis. Kita sambut dengan optimis. Untuk ketersediaan pangan tahun ini, kita optimis dapat semakin baik," kata Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, kemarin.

la menambahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan plafon pinjaman yang dapat diberikan subsidi bunga, berupa pinjaman mencapai Rp 28,7 triliun dalam rangka CPP dan dari itu diberikan subsidi bunga.

Kepala Bapanas Arief menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, BUMN pangan ditugaskan untuk dapat berperan sebagai standby buyer dan off-taker terhadap produksi nasional sehingga, Perum

Bulog dan ID FOOD diberikan subsidi bunga dan penjaminan pinjaman dalam penguatan CPP tahun ini.

"Dengan adanya kebijakan pembiayaan seperti ini kepada BUMN pangan, kita ingin agar sedulur petani bisa tenang dan fokus untuk tingkatkan produksi dalam negeri, karena nanti hasilnya kita serap dengan harga yang baik. CPP yang kuat tentu kita perlukan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah," ucapnya.

Kemenkeu sendiri melalui warkatnya telah mengatur besaran subsidi bunga dalam rangka penyelenggaraan CPP. Kisaran besaran subsidi bunga pinjaman yang ditetapkan antara 3 sampai 4,5 persen yang diberikan melalui 2 skema yakni skema dengan penjaminan dari pemerintah dan skema tanpa

penjaminan.

"BUMN pangan dapat menjalin kerja sama dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah), dan juga bank swasta. Nantinya subsidi bunga pinjaman tersebut diterapkan baik melalui skema penjaminan dari pemerintah atau tanpa penjaminan," tuturnya.

Arief menjelaskan terdapat 13 jenis komoditas pangan yang dikelola sebagai CPP sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP. 13 jenis komoditas dimaksud antara lain beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, dan ikan kembung.

la menegaskan bahwa Bapanas melalui Bulog terus mengutamakan pengadaan dari dalam negeri untuk CPP. Jika nantinya dalam hal pengadaan dalam negeri tidak mencukupi, pengadaan CPP dari luar negeri dapat dilakukan namun harus tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri.

"Dalam pengadaan CPP tahun 2024 kami tekankan bahwa nomor satu itu harus mengutamakan produksi dari dalam negeri, sehingga hasil panen sedulur petani dapat terserap dengan baik. Kami mendukung sepenuhnya kementerian teknis untuk meningkatkan produksi pangan agar target pengadaan CPP tahun ini dapat kita penuhi," ujar Arief. (ANTARA)

Menteri Sandiaga: Pajak Turis ke Bali untuk Pariwisata Berkualitas

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa penerapan pajak kepada wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali sebesar 10 dolar AS atau Rp 150 ribu bertujuan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Kami sangat serius untuk pariwisata berkualitas-berkelanjutan," ujar Sandiaga Uno dalam jumpa pers mingguan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, kemarin.

la menjelaskan bahwa pajak tersebut akan digunakan untuk menangani permasalahan sampah di Bali dengan lebih baik, menjaga kelestarian budaya Bali, dan pemukiman adat-istiadat Bali.

Nantinya, kata dia, wisman hanya akan dikenakan biaya tersebut sebanyak satu kali ketika datang ke Indonesia dan mengunjungi Bali melalui beberapa moda transportasi. Apabila dalam satu kunjungan wisatawan tersebut tiba di Bali, kemudian berwisata ke provinsi lain, dan kembali lagi ke Bali, maka wisman tersebut hanya dikenai biaya sebanyak satu kali. "Mereka (wisman) masuk ke Bali, mereka keluar, terus balik lagi ke Bali, enggak (bayar lagi)," ujar Sandiaga.

la juga menambahkan bahwa kebijakan membayar pajak tersebut



ANTARA/Putu Indah Savitri

Menparekraf Sandiaga Uno.

tidak berlaku bagi warga negara asing pemegang KITAS/KITAP. Dikutip dari Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.6/1049/OTDA, WNA asing lainnya yang dikecualikan adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas, awak kapal, pemegang visa penyatuan keluarga, pemegang visa pelajar, pemegang golden visa, dan pemegang visa non-turis tertentu.

Terkait dengan wisman yang melakukan transit di Bali untuk ke provinsi lainnya, Sandiaga menilai perlu pendekatan khusus karena wisman tersebut tidak berwisata di Bali. "Jadi, ini mungkin nanti perlu pendalaman khusus, karena ini kebijakan baru akan di-

lakukan 14 Februari. Pasti nanti akan ada temuan-temuan dan penyesuaian-penyesuaian," kata Sandiaga.

Kementerian Dalam Negeri RI menerbitkan surat Nomor 100.2.1.6/1049/OTDA terkait fasilitas Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing pada Selasa (30/1). Dalam surat tersebut, Kemendagri mengajukan sejumlah langkah penyempurnaan, seperti melengkapi prosedur teknis pembayaran pajak turis, sebelum ditetapkan. (ANTARA)

Kemenkes: Distribusi Nakes Penting Guna Akses Pelayanan Merata di RI

JAKARTA - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, distribusi tenaga medis dan kesehatan yang merata di tanah air penting dalam penyediaan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dia menjelaskan bahwa pada Hari Kesehatan Sedunia 2024, temanya adalah "My Health, My Right", yang mengingatkan bahwa semua orang berhak mendapatkan layanan kesehatan, gizi, dan edukasi tanpa diskriminasi.

Nadia menuturkan, untuk memenuhi hak tersebut, perlu ada pemerataan akses, salah satunya dengan pemerataan SDM kesehatan. "Jumlah rasio tenaga kesehatan kita itu belum sesuai ya. Kalau kita lihat rasio dokter dengan penduduk kita hanya 0,47 per seribu penduduk. Kalau kita rata-rata dunia itu 1,76 per seribu," ujarnya keti-

ka dihibung di Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, kata Nadia, ada sejumlah upaya yang dilakukan, seperti pemberian 3000 beasiswa bagi SDM kesehatan. Beasiswa tersebut, ujarnya, diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, beasiswa itu dimaksudkan agar para dokter umum bermigrasi menjadi dokter spesialis. Dia menjelaskan, sebanyak 30 dari 38 provinsi di Indonesia masih kekurangan tenaga spesialis.

Selain pemberian beasiswa, katanya, mereka juga mencanangkan pendidikan berbasis rumah sakit guna memproduksi lebih banyak tenaga medis, agar distribusi semakin merata. "Kita berharap lebih banyak lagi rumah sakit yang mampu. bukan hanya rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan, tapi ada rumah sakit BUMN, rumah sakit swasta,

rumah sakit umum daerah dapat mengembangkan proses pendidikan berbasis rumah sakit tadi," kata dia menambahkan.

Upaya-upaya lainnya, kata dia, adalah penyederhanaan registrasi untuk Surat Izin Praktik (SIP) serta Surat Tanda Registrasi (STR). "Kemudian yang lain adalah kemudahan untuk diaspora untuk kembali ke Indonesia, ya. Proses adaptasi, kemudian bagaimana untuk diaspora bekerja kembali ke Indonesia," katanya.

Selain distribusi SDM yang merata, kata Nadia, sarana dan prasarana pun perlu ditingkatkan guna perluasan akses. Oleh karena itu, katanya, Kementerian Kesehatan melakukan upaya seperti peningkatan fasilitas peralatan di puskesmas, distribusi antropometri, serta USG guna deteksi dini serta pencegahan yang lebih baik di tingkat pelayanan primer. (ANTARA)

ANTARA

Kinerja ekspor hasil hutan triwulan I-2024

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat kinerja ekspor hasil hutan Indonesia pada triwulan I-2024 meraih hasil positif di tengah kondisi pasar yang penuh ketidakpastian akibat situasi geopolitik dan ekonomi global.



Upaya KLHK menjaga kinerja ekspor



Ekspor hasil hutan Indonesia



KLHK mencanangkan target ekspor yang moderat pada tahun ini. Beberapa hal yang perlu diantisipasi dalam pencapaian kinerja ekspor adalah beberapa negara pasar masih dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19"



Agus Justianto
Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK

ARTIKEL

Peluang Sejahterakan Petani dengan Smartphone Berbasis Android/iOS

Oleh Dr Agus Hadiarto SP MAbm

JAKARTA - Petani sayuran kecil di Pulau Jawa dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi khususnya smartphone berbasis Android/iOS untuk meningkatkan produktivitas dan harga jual produk. Petani kecil di Pulau Jawa umumnya memiliki luasan sekitar 1/4 ha.

Petani sayuran berpeluang lebih besar karena memiliki jiwa agribisnis yang lebih tinggi dibanding petani tanaman pangan yang masih bersifat subsisten. Bertani subsisten adalah pola bertani yang minimnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah tangga petani kecil lebih tertarik menanam komoditas sayuran untuk mendapat penghasilan tambahan dibanding memilih tanaman pangan.

Petani sayuran kemudian memanfaatkan smartphone atau telepon pintar yang terinstal berbagai aplikasi untuk mendukung produksi dan pemasaran pertanian sehingga mereka mampu meningkatkan produktivitas usaha tani, menurunkan biaya input atau produksi, dan meningkatkan harga jual.

Riset berupa survei dan wawancara terhadap petani sayuran yang menggunakan kuesioner terstruktur telah dilakukan untuk membuktikan hal tersebut di 3 kecamatan di 3 kabupaten yaitu di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat; Sleman, DI Yogyakarta; dan Malang, Jawa Timur.

Data dikumpulkan dari 375 responden terpilih di wilayah masing-masing antara November 2021 hingga Maret 2022. Riset dilakukan untuk membangun model ekonometrik yang disebut model Multivariate Linier Regression (MLR) untuk menilai faktor-faktor heterogen yang mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga petani sayuran skala kecil melalui peningkatan produktivitas, penurunan biaya produksi, dan peningkatan harga jual.

Penelitian tersebut mengikuti Teori Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang disesuaikan dengan sektor pertanian. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat literasi TIK di sektor pertanian di Indonesia adalah 2,44 dari skala 4,00. Hal tersebut bermakna bahwa petani sayuran telah memiliki kompetensi dalam menggunakan teknologi digital, khusus dalam hal pemahaman terhadap penggunaan TIK, pencarian informasi, dan mulai melakukan komunikasi di ruang digital (digital space).

Riset tersebut telah menambah literasi digital terkait transformasi di bidang pertanian yang berimplikasi pada pencapaian produksi komoditas sayuran yang berkelanjutan dan layak secara ekonomi bagi petani kecil di Indonesia.

Di kalangan petani terungkap bahwa petani dikelompokkan menjadi lima kategori dalam hal penggunaan handphone biasa atau smartphone untuk aktivitas pertanian. Kelompok pertama, petani tidak menggunakan telepon seluler sama sekali, baik handphone biasa maupun smartphone. Kedua, petani yang menggunakan handphone atau smartphone hanya untuk keperluan telepon dan SMS saja.

Ketiga, petani yang menggunakan smartphone dengan menggunakan aplikasi WhatsApp namun tidak menggunakan banyak aplikasi lainnya. Keempat, petani yang menggunakan smartphone dengan berbagai aplikasi media sosial (tidak hanya WhatsApp). Kelima adalah level tertinggi yaitu petani yang menggunakan smartphone dengan memanfaatkan berbagai aplikasi baik media sosial maupun non-media sosial untuk meningkatkan produksi dan pemasaran pertanian. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata petani responden yang luasanya sekitar 1/4 ha berpenghasilan Rp4,2-juta rupiah per bulan. Penghasilan paling kecil Rp 1,3-juta dan penghasilan paling tinggi Rp 9,2-juta per bulan.

Dari satu komoditas sayuran, petani dapat memperoleh tambahan pendapatan rumah tangga (ceteris paribus) sebesar Rp 133.000 per bulan jika petani dapat meningkatkan satu level penggunaan telepon seluler untuk kegiatan usahatani. Petani juga dapat menambah pendapatannya sebesar Rp 170.000 per bulan jika petani dapat meningkatkan satu level penggunaan telepon seluler untuk kegiatan penjualan hasil pertanian. Bahkan petani dapat meningkatkan pendapatan 5 kali lipat jika mampu beralih



ANTARA/FOTO/Muhammad Bagus Khoirunisa/aww

Petani memantau cuaca melalui aplikasi gawainya di Desa Tambak Baya, Lebak, Banten.

dari level dasar ke level tertinggi, yaitu penggunaan smartphone dengan berbagai aplikasi lengkap. Hal ini menggarisbawahi peluang ekonomi luar biasa yang terbuka melalui integrasi TIK di bidang pertanian. Hasil penelitian menemukan kompleksnya permasalahan rumah tangga pertanian untuk membuat keputusan yang dilematis antara peningkatan harga jual dan produktivitas, termasuk menurunkan biaya input produksi.

Jika produktivitas regional/nasional meningkat maka akan terjadi oversupply komoditas pertanian dan selanjutnya harga jual akan turun. Namun demikian, trade-off ini merupakan bagian integral dalam mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan pendapatan rumah tangga petani skala kecil. Penelitian juga menemukan ukuran besaran peningkatan produktivitas yang dibutuhkan untuk menurunkan biaya produksi tanpa menurunkan harga jual sehingga usaha tani efektif dan efisien.

Berperan Penting

Penggunaan smartphone untuk keperluan aktivitas pertanian memainkan peranan yang penting untuk pembangunan pertanian. Pengambil kebijakan dapat menjadikan literasi TIK dan level penggunaan telepon seluler sebagai katalisator. Pengambil kebijakan dapat mulai mempromosikan literasi TIK dan optimalisasi smartphone di kalangan petani dan stakeholder terkait. Berikutnya stakeholder termasuk penyuluh pertanian dapat memberikan training berdasarkan kelas atau level petani dalam menggunakan telepon seluler.

Petani yang hanya bisa menggunakan handphone biasa tidak bisa dijadikan dalam satu kelas dengan petani yang terbiasa dengan berbagai aplikasi di smartphone-nya untuk mendukung aktivitas pertanian. Penelitian juga mengungkap bahwa kaum perempuan lebih efektif dari pada laki-laki untuk mendapatkan pelatihan tersebut. Selain peningkatan skill bagi petani, akses infrastruktur TIK dan teknologi finansial juga menjadi hal yang penting untuk ditingkatkan.

Pengambil kebijakan dan stakeholder terkait (provider penyedia internet) perlu menyediakan jaringan internet 4G di berbagai tempat terutama di sentra pertanian penyangga kota besar/kecil (pasar bagi komoditas pertanian). Selain itu, internet satelit atau konstelasi satelit orbit rendah bumi (low-earth orbit/LEO) dapat menjadi cakupan alternatif yang efektif dalam menyediakan konektivitas ke daerah-daerah terpencil melalui jaringan internet 4G yang biasanya sulit untuk disediakan.

Pada aspek teknologi finansial, perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat mempromosikan mobile money dengan menyediakan fitur layanan dan informasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. Hal tersebut agar rumah tangga pertanian dapat semakin mahir dalam menggunakan teknologi finansial. Salah satunya dapat secara langsung menggunakan aplikasi e-commerce untuk meningkatkan harga jual dengan mengangkas (cut-off) rantai pasok. Teknologi finansial juga dapat mengurangi transaction cost dan resiko keuangan saat bertransaksi dengan pedagang.

*Penulis adalah Doktor Ilmu Ekonomi Pertanian IPB dan Peneliti di Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, BRIN.